

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi.Revisi, Cetakan.3, PT Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar masalah korupsi (aspek nasional dan aspek internasional)*, Cetakan.1, Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adam, 2003, *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*, Edisi.1, Cetakan.1, Bayumedia Publishing, Malang.
- _____, 2015, *Hukum pidana korupsi di Indonesia*, Edisi.Revisi, Cetakan.1, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2014, *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*, Cetakan.5, Media Nusa Creative, Malang.
- Danil, Elwi, 2014, *Korupsi (Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya)*, Edisi.1, Cetakan.3, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darul, Rosikah Chatrina dan Marliani Listianingsih Dessy, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik)*, Cetakan.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahroji, Ikhwan, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Cetakan.1, Setara Press, Malang.
- Ghufron, Nurul, 2014, *Whistleblower dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, Pustaka Radja, Surabaya.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak pidana korupsi*, Cetakan.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed.2, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus*, Edisi.1, Cetakan.2, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Edisi.Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator (Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi)*, Cetakan.1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir dan Nursal Muhammad, 2021, *Kumpulan asas-asas hukum*, Cetakan.4, Rajawali Pers, Jakarta.

- Indah, Maya S, 2012, *Perlindungan korban : suatu persepektif viktimologi dan kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2017, *Logika Hukum*, Edisi.1, Kencana, Jakarta.
- K Robert, 2019, *Hukum perlindungan saksi (dalam pemberantasan tindak pidana korupsi)*, Cetakan.1, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*, Edisi.1, Cetakan.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Cetakan.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Khairandi, Ridwan, 2015, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik (Sikap yang harus diambil pengadilan)*, Cetakan.1, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kristiana, Yudi, 2018, *Tehnik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan.1, Thafa Media, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Persepektif Hukum Progresif)*, Cetakan.1, Thafa Media, Yogyakarta.
- Mahfud, MD Moh, 2020, *Politik hukum di Indonesia*, Edisi.revisi, Cetakan.10, Rajawali Pers, Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2020, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Cetakan.1, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan.1, Red & White Publishing, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator (Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime)*, Edisi.1, Cetakan.1, PT. Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhadar, Abdullah Edi dan Tamrin Husni, 2010, *Perlindungan saksi & korban dalam sistem peradilan pidana*, Edisi.1, Putra Media Nusantara, Surabaya.

- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*, Edisi.1, Cetakan.4, PT Alumni.
- Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana : Konsepsi pembaharuan hukum pidana dalam cita Negara hukum*, Edisi.Revisi, Cetakan.1, Setara Press, Malang.
- Nasution, Adnan Buyung, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Aksara Karunia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Edisi 1, Cetakan 2, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Edisi 1, Cetakan 2, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salim HS dan Nurbani, Erlies Septiana, 2017, *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi 1, Cetakan 5, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2019, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Edisi.1, Cetakan.9, Rajawali Pers, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi.1, Cetakan.10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2021, *Bahan kuliah (Metodologi penelitian ilmu hukum)*, Edisi.revisi, Universtas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi A'an, 2015, *Penelitian hukum (legal research)*, Cetakan.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak Yoan N dan Hage Markus Y, 2019, *Teori hukum (strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi)*, Edisi.revisi, Cetakan.5, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2018, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Cetakan.6, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Cetakan.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Cetakan.2, Sinar Grafika, Jakarta.

- Wibowo, Adhi, 2013, *Perlindungan hukum korban amuk massa (suatu tinjauan viktimologi)*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi (Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan)*, Cetakan.2, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yurizal, 2015, *Reformulasi kewenangan Polri dan PPNS dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup*, Cetakan.4, Media Nusa Creative, Malang.

B. Artikel Jurnal

- Afif, Muhammad, 2018, “Eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana di Indonesia”, *Ensiklopedia of Jurnal*, Volume.1, Nomor.1, Oktober 2018.
- Akbar, Djati dan Sambas Nandang, “Peran LPSK dalam melindungi saksi Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume.7, Nomor.1, 2021.
- Association for Progressive Communications (APC), *The protection of sources and whistleblowers (Submission to the United Nations Special Rapporteur on the Right to Freedom of Opinion and Expression)*, 2015.
- Arjuno, Bambang, Ruba’i Masruchin dan Djatmika Prija, “Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Indonesia”, *Jurnal Selat*, Volume.4, Nomor.2, Mei 2017.
- Awaludin, Arif, “Mempidanakan Para Whistleblower Korupsi”, *Legal Studies Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2022.
- Azzahra, Nabilla dan Hutabarat Rugun Romaida, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume.4, Nomor.1, Juni 2021.
- Bunga, Marten, Maroa Dg Mustating, Arief Amelia dan Djanggih Hardianto, “Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Law Reform*, Volume.15, Nomor.1, Juni 2019.
- Cristianto, Hwian, “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi *Whistleblower* Kasus Korupsi”, *Jurnal Dinamika HAM*, Volume 11, Nomor 1, Mei 2012.
- Dennis, Josua Zakawerus, “Sistim Perlindungan Terhadap Saksi, Ahli, dan Pelapor Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Volume.8, Nomor.11, November 2019.

- Desak, Made Risa dan Yohanes Usfunan, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Journal Ilmu Hukum*, Kertha Wicara, Volume.7, Nomor.2, 2018.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, “Reformasi Hukum dan Perlindungan *Whistleblower* di Indonesia”, *Jurnal LPSK*, Volume.3, 2013.
- Fiskia, Joan Matondong, “Perlindungan Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Lex Crimen*, Volume.4, Nomor.3, 2015.
- Irawan, Aris, “Politik hukum pembentukan undang-undang perlindungan saksi dan korban, dilihat dari perlindungan saksi pelapor (*whistleblower*) dan saksi ahli di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume.4, Nomor.1, Juni 2013.
- Jatmiko, Tio, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Volume.8, Nomor.2, Juli-Desember 2020.
- Kusoy, Monica Christin, “Perlindungan terhadap *Whistleblower* pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Lex Administratum*, Volume 5, Nomor 9, November 2017.
- Mulyadi, Lilik, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia masa mendatang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume.3, Nomor.2, Juli 2014.
- Nixson, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *USU Law Journal*, Volume.2, Nomor.2, November 2013.
- Podungge, Alamsyah dan Ratnawati, Elfrida, “Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia”, *Unes Law Review*, Volume 5, Issue 3, Maret 2023.
- Rahmansyah, Ilham, “Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurist Diction*, Volume.3, Nomor.6, November 2020.
- Sinar, Syukri Akub Muhammad dan Asis Abdul, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Amanna Gappa*, Volume.28, Nomor.2, 2020.

- Wijaya, Firman, “Rekonstruksi Keadilan dalam Pengungkapan tindak pidana korupsi melalui *whistleblower* dan justice collaborator, *Jurnal Imiah Widya*, Volume 3, Nomor 4, Agustus-Desember 2016
- Wiranti, Yenni dan Arifin Ridwan, “Tantangan dan permasalahan penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia”, *Kosmik Hukum*, Volume.20, Nomor.1, 2020.
- Wisnubroto, Al, “Problematisa dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume.25, Nomor.1, Januari 2007.
- Yadi dan Lesman Teddy, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (*whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2022.
- Yuhermansyah, Edi, “Urgensi Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Persepektif Kebijakan Hukum Pidana)”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Volume.1, Nomor.1, Januari-Juni 2012.

C. Karya Ilmiah

- Awaludin, Arif, 2011, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi di Jawa Tengah)”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ekwanto, Endah Rizki, 2020, “Reformulasi pengaturan mengenai pasal-pasal prosedur perlindungan dalam UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga no. 23 tahun 2004 yang tidak efektif dalam implementasinya”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Juniariska, Clara Shinta, 2020, “Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai *Whistleblower* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Artikel Majalah

- Sulistiani, Lies, “Melaporkan tetapi dilaporkan”, *Kesaksian: Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban*, 10 Maret 2017.

E. Internet

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (KBBI) Daring, “Reformulasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reformulasi>, diakses pada tanggal 23 September 2022.

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (KBBI) Daring, “Pengaturan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaturan>, diakses pada tanggal 23 September 2022.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (KBBI) Daring, “Perlindungan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 21 September 2022.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (KBBI) Daring, “Hukum”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada tanggal 21 September 2022.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (KBBI) Daring, “Pelapor”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelapor>, diakses pada tanggal 22 September 2022.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (KBBI) Daring, “Korupsi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada tanggal 14 September 2022.
- Detik.com, “Gibran Minta kepada Joman tak polisikan ubedillah badrun : tekne wae!”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5897805/gibran-minta-joman-tak-polisikan-ubedillah-badrn-tekne-wae>, diakses pada tanggal 22 maret 2023
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Risalah Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 24 Januari 2006 dalam ruang rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Proses pengajuan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban”, <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/334>, diakses pada tanggal 1 februari 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/917>, diakses pada tanggal 1 februari 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 6 Mei 2014 : Landasan Filosofis dibentuknya UU PSK”,

<https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/917>, diakses pada tanggal 1 februari 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR-RI dengan Pakar Hukum Pidana tanggal 15 Juni 2006 dalam ruang rapat komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/334>, diakses pada tanggal 16 februari 2023.

Dialeksis, “Diduga korupsi, Gempar desak Polda Aceh untuk tangkap Bupati Simeulue”, <https://dialeksis.com/aceh/diduga-korupsi-gempar-desak-polda-aceh-tangkap-bupati-simeulue/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

Indonesia Corruption Watch, “Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021”, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

_____, Siaran “Pers dan Aktivitas”, <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers> dan <https://antikorupsi.org/id/category/aktivitas>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024”, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/rencana-strategis-kpk>, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi”, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>, diakses pada tanggal 10 februari 2023.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, <https://lpsk.go.id/publikasi/laporan>, diakses pada tanggal 10 februari 2023.

Lex Scientia FH Unes, “Perlindungan Hukum terhadap whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi”, <http://lexscientia.ukm.unnes.ac.id/artikel-hukum/perlindungan-hukum-terhadap-whistleblower-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi/86/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

Liputan 6, “Polda Metro Jaya Mulai Mengusut laporan Joman ke ubedillah”, <https://www.liputan6.com/news/read/4863329/polda-metro-jaya-mulai-mengusut-laporan-joman-ke-ubedilah>, diakses pada tanggal 22 maret 2023.

Media Indonesia, “Polisi periksa pelapor dugaan korupsi pembangunan asrama UIN”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/386425/polisi-periksa->

pelapor-dugaan-korupsi-pembangunan-asrama-uin, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

Nawacita Post, “Pegiat anti korupsi Kepri Kawal Laporan Bupati Natuna di Kajati”, <https://nawacitapost.com/nasional/daerah/2022/03/11/pegiat-anti-korupsi-kepri-kawal-laporan-bupati-natuna-di-kajati/>, diakses pada tanggal 22 maret 2023.

Tempo.CO, “Relawan Jokowi akan cabut Laporan Terhadap Ubedillah badrun di Polda Metro Jaya”, <https://nasional.tempo.co/read/1625351/relawan-jokowi-akan-cabut-laporan-terhadap-ubedilah-badrun-di-polda-metro-jaya>, diakses pada tanggal 22 maret 2023

Transparency International, “*The Global Coalition Against Corruption, Corruption Preception Index 2021*”, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

Ulasan.co, “Bupati Natuna Wan Siswandi laporkan Warganya ke Polda Kepulauan Riau”, <https://ulasan.co/bupati-natuna-wan-siswandi-laporkan-warganya-ke-polda-kepri/>, diakses pada tanggal 22 maret 2023.

United Nations Convention Against Corruption, “Cooperation with law enforcement authorities”, https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635). Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, nomor : PER-045/A/JA/12/2011, nomor : 1 Tahun 2011, nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, nomor : 4 Tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
- Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia nomor: SPJ-97/01-55/03/2017, nomor: KEP-087/A/JA/03/2017, nomor: B/27/III/2017 tentang kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.